

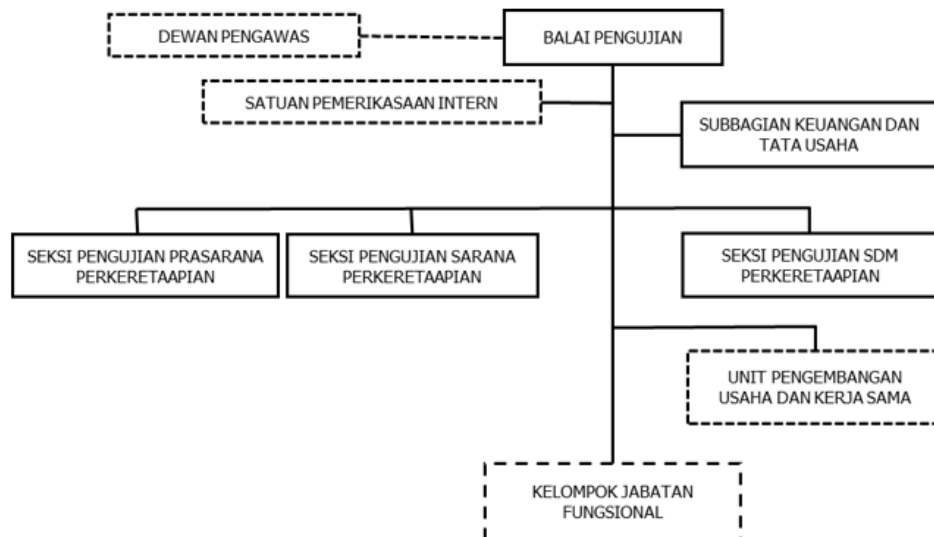
BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Balai Pengujian Perkeretaapian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian. Balai Pengujian Perkeretaapian termasuk unit pelaksana teknis yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. Kondisi Balai Pengujian Perkeretaapian. Adapun struktur organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian pada Gambar II.1:

1. Struktur Organisasi



Gambar II. 1 Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian

Sumber: PM No 56 Tahun 2023

2. Gambaran Umum Tupoksi Per Bidang di Balai Pengujian Perkeretaapian

a. Kedudukan

Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. Sebagaimana yang dipimpin oleh seorang kepala balai.

b. Tugas

Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Balai pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategis bisnis, dan rencana bisnis anggaran.
- 2) Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian.
- 3) Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian.
- 4) Pelaksanaan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian.
- 5) Pelaksanaan pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana perkeretaapian lainnya.
- 6) Pelaksanaan analisis isu aktual perkembangan perkeretaapian.
- 7) Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan pengujian perkeretaapian.
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan intern.
- 9) Pelaksanaan urusan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama.
- 10) Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, serta evaluasi.

3. Wilayah Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Perkeretaapian mengemban tugas untuk melaksanakan pengujian terhadap prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pengujian dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang aman dan nyaman serta selamat. Pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian saat ini terdapat pada beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Daerah Operasi:

Terdapat sembilan Daerah Operasi (DAOP) yang mengoperasikan kereta api di Jawa. Berikut kesembilan Daerah Operasi tersebut:

- 1) Daop I : Berkedudukan di Jakarta
- 2) Daop II : Berkedudukan di Bandung
- 3) Daop III : Berkedudukan di Cirebon
- 4) Daop IV : Berkedudukan di Semarang
- 5) Daop V : Berkedudukan di Purwokerto
- 6) Daop VI : Berkedudukan di Yogyakarta
- 7) Daop VII : Berkedudukan di Madiun
- 8) Daop VIII : Berkedudukan di Surabaya
- 9) Daop IX : Berkedudukan di Jember

b. Divisi Regional:

Terdapat empat Divisi Regional di Sumatera. Berikut keempat Divisi Regional tersebut:

- 1) Subdivre I.1 : Berkedudukan di Aceh
- 2) Divre I : Berkedudukan di Medan
- 3) Divre II : Berkedudukan di Padang
- 4) Divre III : Berkedudukan di Palembang
- 5) Divre IV : Berkedudukan di Tanjungkarang

c. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kereta api di Pulau Sulawesi, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan, dengan kepemimpinan BPKA SULSEL berada dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, BPKA SULSEL melayani rute Makassar-Parepare dengan total 8 stasiun yang telah dioperasikan.

4. Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengujian Perkeretaapian memiliki Target yang disusun dalam dokumen Rencana Strategis sebagai tolak ukur penting dari suatu mekanisme sistem akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas sarana,

prasarana, serta sumber daya manusia dalam kurun waktu lima tahun pada periode 2020-2024. Sehingga pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian selama lima tahun mengacu pada rencana strategis agar pelaksanaan pengujian dapat terukur. mengenai penjelasan capaian kinerja maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengujian Perkeretaapian untuk memberikan data capaian kinerja pada tiap tahunnya. Berikut merupakan capaian kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian periode 2020-2023 pada Tabel II.1 s.d Tabel II.3.

a. Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Tabel II. 1 Realisasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Satuan	2020	2021	2022	2023
Km'sp	2936,15	272,40	444,61	468,073
Unit	347	94	188	285

Sumber: LKIP Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023

b. Pengujian Sarana Perkeretaapian

Tabel II. 2 Realisasi Pengujian Sarana Perkeretaapian

TAHUN	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	PERSENTASE
2020	3.000	2.630	87%
2021	7.000	7.391	105%
2022	10.000	11.750	117%
2023	11.000	12.524	113%

Sumber: LKIP Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023

c. Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Tabel II. 3 Realisasi Pengujian SDM Perkeretaapian

TAHUN	TARGET (orang)	REALISASI (orang)	PERSENTASE
2020	3.000	3.334	111%
2021	11.500	6.135	53%
2022	12.500	4.062	32%
2023	13.500	11.127	82%

Sumber: LKIP Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023

5. Kondisi Wilayah Kajian

Balai Pengujian Perkeretaapian berlokasi di Jalan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kondisi eksisting Balai Pengujian Perkeretaapian saat ini selain menjadi tempat operasional kantor juga menjadi tempat lokasi dilaksanakannya pengujian sumber daya manusia perkeretaapian.



Gambar II. 2 Balai Pengujian Perkeretaapian

Sumber: Tim PKL Balai Pengujian Perkeretaapian, 2024

6. Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian, seksi pengujian prasarana perkeretaapian merupakan salah satu seksi di lembaga Balai Pengujian Perkeretaapian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengujian terhadap prasarana perkeretaapian baik jalur dan dan bangunan serta fasilitas operasi dengan melakukan uji pertama maupun uji berkala.

Dalam melaksanakan pengujian jalur dan bangunan, seksi pengujian prasarana perkeretaapian menjalankan tugasnya berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun.
- 6) SOP-K3DJKA 2 Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengujian prasarana perkeretaapian memiliki jumlah ketersediaan tenaga penguji sebanyak 34 orang, dengan keseluruhan tenaga penguji sudah memiliki sertifikasi keahlian. Rincian ketersediaan jumlah tenaga penguji yaitu 3 tim untuk jalur dan bangunan serta 4 tim untuk fasilitas operasi. Rincian per tim penguji jalur dan bangunan yaitu 5 orang dengan keterangan 2 penguji dan 3 asisten penguji:

Tabel II. 4 Tabel Jumlah SDM Penguji Prasarana Perkeretaapian

DIVISI	PENGUJI	ASISTEN PENGUJI
JALUR DAN BANGUNAN	6	10
FASILITAS OPERASI	5	13
JUMLAH	11	23

Sumber: LKIP Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023

7. Peralatan Pengujian Jalur dan Bangunan Perkeretaapian

Untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian, seorang penguji wajib untuk menggunakan peralatan pengujian agar menghasilkan pengukuran yang akurat. Berikut merupakan terkait jumlah dan kondisi peralatan pengujian yang tersedia pada seksi pengujian prasarana perkeretaapian baik jalur dan bangunan, fasilitas operasi, dan peralatan pendukung pengujian pada Tabel II.5.

Tabel II. 5 Peralatan Pengujian Jalur dan Bangunan

No	Nama Alat	Fungsi	Kondisi	Gambar
1.	<i>Track geometry trolley</i>	mengukur geometri jalan rel	4 unit (1 baik, 3 belum kalibrasi)	
2.	<i>Track gauge 1067</i>	mengukur geometri wesel	5 unit (4 baik, 1 belum kalibrasi)	
3.	<i>Track gauge 1435</i>	Mengukur geometri wesel	5 unit (2 baik, 3 belum kalibrasi)	
4.	<i>Versine measurement</i>	Mengukur lengkung horizontal	5 unit (4 baik, 1 belum kalibrasi)	

Tabel II.5 Lanjutan

No	Nama Alat	Fungsi	Kondisi	Gambar
5.	<i>Clearance platform gauge 1067</i>	Mengukur bangunan peron	2 unit baik	
6.	<i>Clearance platform gauge 1435</i>	Mengukur bangunan peron	2 unit belum kalibrasi	
7.	<i>Total station</i>	Mengukur kelandaian jalan rel dan kemiringan drainase	2 unit baik	
8.	<i>Theodolite</i>	Mengukur chamber jembatan	10 unit baik	
9.	<i>Hammer test</i>	Mengukur tekanan beton terowongan dan jembatan	12 unit (4 baik, 8 belum kalibrasi)	

Tabel II.5 Lanjutan

No	Nama Alat	Fungsi	Kondisi	Gambar
10.	<i>Coating thickness</i>	Mengukur ketebalan cat jembatan	4 unit (3 baik, 1 belum kalibrasi)	
11.	<i>Corrosion thickness</i>	Mengukur korositas pada jembatan	9 unit (4 baik, 5 belum kalibrasi)	
12.	termometer rel	Mengukur suhu rel pada celah plat sambung	8 unit baik	
13.	Tapper gauge	Mengukur lebar celah pelat sambung	6 unit baik	

Tabel II.5 Lanjutan

No	Nama Alat	Fungsi	Kondisi	Gambar
14.	Filler gauge	Mengukur kerataan sambungan rel dengan las	5 unit (4 baik, 1 rusak)	
15.	Mistar besi	Mengukur kerataan sambungan rel dengan las	1 unit baik	
16.	Meteran	Mengukur jarak/dimensi	10	
17.	Gelas ukur	Mengukur laju kebocoran pada terowongan	0	Belum tersedia

Sumber: Tim PKL Balai Pengujian Perkeretaapian, 2024

Tabel II. 6 Peralatan Pendukung Pengujian Jalur dan Bangunan

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi
1.	Head Lamp	16	Baik
2.	Printer Portable	5	baik

Tabel II.6 Lanjutan

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi
3.	Ipad Air 5	4	Baik
4.	Laptop ROG	1	Baik
5.	Senter	37	Baik
6.	Electric Glove	10	Baik
7.	Sepatu Safety	16	Baik
8.	Wearpack	16	Baik
9.	Helm	16	Baik
10.	Handy Talky	2	Baik

Sumber: Tim PKL Balai Pengujian Perkeretaapian, 2024

Pada kondisi eksisting rak penyimpanan peralatan pengujian jalur dan bangunan di Balai Pengujian Perkeretaapian masih belum dapat mengakomodasi jumlah peralatan pengujian. sehingga masih memanfaatkan ruangan yang tersedia di sekitar ruangan simulator. Berikut beberapa dokumentasi terkait kondisi eksisting rak penyimpanan peralatan pengujian jalur dan bangunan pada Gambar II.3 s.d Gambar II.5.



Gambar II. 3 Kondisi Penyimpanan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024



Gambar II. 4 Kondisi Penyimpanan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024



Gambar II. 5 Kondisi Penyimpanan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024



Gambar II. 6 Peralatan Pengujian Prasarana yang akan dilakukan perawatan
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Untuk mengembalikan kondisi dan jumlah peralatan pengujian prasarana perkeretaapian yang siap digunakan, seksi pengujian prasarana perkeretaapian melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian untuk memperbaiki komponen-komponen alat yang kurang lengkap ataupun mengalami kerusakan. Perawatan dan kalibrasi pada peralatan pengujian masih menggunakan pihak lain dikarenakan belum terdapat workshop dan ahli tenaga teknis perawatan peralatan pengujian di Balai Pengujian Perkeretaapian. Berikut peralatan pengujian yang sedang dalam perawatan pada bulan Mei 2024 pada Tabel II.7.

Tabel II. 7 Perawatan Terhadap Peralatan Pengujian jalur dan bangunan

Nama Alat	Jumlah
Hammer Test	8
Track Gauge 1067	4
Track Gauge 1435	3
Track Geometry Trolley Abtus	1

Sumber: Tim PKL Balai Pengujian Perkeretaapian, 2024

B. Rencana Strategis Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai lembaga instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan secara

Badan Layanan Umum (BLU) telah menyusun Rencana Strategis Bisnis untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Dokumen Rencana Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi dan misi serta langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian dalam kurun waktu tahun 2022-2026. Dengan fokus penelitian penulis pada seksi pengujian prasarana perkeretaapian bidang jalur dan bangunan, maka matriks sasaran dan indikator kinerja seksi pengujian prasarana perkeretaapian dilampirkan pada Tabel II.8.

Tabel II. 8 Rencana Strategis Bisnis Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Sasaran	Satuan	Target Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah pengujian prasarana perkeretaapian	Km'sp	450	459	468	477	486
	Unit	140	160	180	200	220
Jumlah SDM penguji yang dibutuhkan	Orang	2	4	4	4	2
Jumlah peralatan pengujian yang diperlukan	Unit	18	20	22	22	24

Sumber: Rencana Strategis Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian

C. Pengujian Prasarana Perkeretaapian Bidang Jalur dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2011 tentang tata cara pengujian dan pemberian sertifikat prasarana perkeretaapian, setiap prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi kelaikan teknis dan operasi yang dibuktikan melalui pengujian prasarana perkeretaapian. Pada pengujian prasarana perkeretaapian khususnya bidang jalur dan bangunan meliputi:

1. Jalur kereta api;
 - a. Jalan rel;
 - b. Jembatan;
 - c. Terowongan;
2. Bangunan kereta api;
 - a. Stasiun;
 - b. Depo ;

Pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian pada jalur dan bangunan terdiri dari beberapa jenis pengujian sebagai berikut:

1. Uji Pertama

Uji pertama merupakan pengujian yang wajib dilakukan untuk kondisi prasarana perkeretaapian baru dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis. Uji yang dilakukan pada uji pertama meliputi:

a. Uji rancang bangun

Uji rancang bangun merupakan uji kesesuaian antara rancang bangun dengan fisik prasarana perkeretaapian.

b. Uji fungsi

Uji fungsi dilakukan untuk memastikan prasarana perkeretaapian dapat berfungsi sesuai dengan desain dan persyaratan teknis.

2. Uji Berkala

Uji berkala wajib dilakukan pada prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi prasarana perkeretaapian.

a. Uji fungsi

Uji fungsi yang dilakukan pada uji pertama dan berkala prasarana perkeretaapian bidang jalur dan bangunan meliputi:

1) Jalan rel

- a) Ruang bebas;
- b) Kecepatan;
- c) Beban gandar.

2) Jembatan dan terowongan

- a) Ruang bebas;
- b) Beban gandar.

3) Stasiun

- a) Ruang bebas;
- b) Kapasitas Gedung;
- c) Kapasitas peron;
- d) Kecepatan;
- e) Beban gandar.

D. Alur Proses Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan SOP pengujian prasarana perkeretaapian di Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi, Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi khususnya seksi

pengujian prasarana perkeretaapian melaksanakan proses pengujian sebagai berikut:

1. Pihak pemohon/operator mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Direktorat Jenderal perkeretaapian disposisikan permohonan pengujian kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian disposisikan kepada Balai Pengujian Perkeretaapian untuk memproses permohonan pengujian pertama/berkala prasarana perkeretaapian.
4. Kepala Balai Pengujian memberikan tugas kepada seksi pengujian prasarana perkeretaapian untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pengujian. dokumen yang diperiksa berdasarkan klasifikasi pengujiannya sebagai berikut:
 - a. Dokumen uji pertama:
 - 1) Spesifikasi teknis;
 - 2) Detail Engineering Design;
 - 3) Gambar kerja (Shop drawing);
 - 4) Gambar hasil kerja (Shop drawing).
 - b. Dokumen Uji Berkala:
 - 1) Sertifikasi Uji Pertama;
 - 2) Data perawatan 3 bulan terakhir;
 - 3) Data hasil KA ukur;
 - 4) Analisis data KA ukur dalam bentuk track quality index.
5. Memproses dokumen pemohon pengujian serta menyusun PNBK rincian pembayaran pengujian untuk dilakukan pembayaran oleh pemohon.
6. Pemohon pengujian melakukan pelunasan biaya pengujian.
7. Mengkoordinasikan terkait perencanaan pelaksanaan pengujian (jadwal, surat tugas, alat pengujian, pemberitahuan pelaksanaan pengujian).
8. Kepala seksi pengujian prasarana memeriksa dan memberikan paraf pada surat tugas untuk ditandatangani oleh kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.

9. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian menyetujui dan menandatangani surat tugas.
10. Pelaksanaan pengujian.
11. Menyusun konsep berita acara oleh pihak yang ikut serta dalam pengujian.
12. Penandatanganan hasil berita acara oleh seluruh pihak yang ikut serta dalam pengujian.
13. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian menyetujui hasil berita acara dan menyampaikan kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
14. Jika hasil pengujian dinyatakan lulus maka akan ditindak lanjuti untuk pemberian sertifikat.
15. Jika terdapat temuan yang harus dilakukan perbaikan maka dikembalikan kepada pemohon pengujian dan wajib melaporkan setelah dilakukan perbaikan.

E. Observasi pengujian prasarana perkeretaapian

Selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis mengikuti pengujian jalur dan bangunan serta fasilitas operasi. Dalam kegiatan pengujian penulis dapat melihat kondisi eksisting peralatan pengujian yang dipakai serta cara pelaksanaan pengujian. Namun dalam pelaksanaan pengujian terdapat beberapa kendala yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini.

Pengalaman penulis mengikuti pengujian jalur dan bangunan yaitu pengujian pertama Stasiun Pondok Rajeg dan pengujian jalan rel KM 40+950 s.d KM 41+550. Pada pengujian jalan rel saat ini terkhusus pengukuran geometri jalan rel Balai Pengujian Perkeretaapian menggunakan alat track geometry trolley. Alat tersebut memberikan kinerja yang baik bagi penguji dan kegiatan pengujian, dikarenakan kemudahan dalam pengoperasian alat, daya tahan alat yang kuat dan mampu mengambil data pengukuran sampai puluhan kilometer dengan akurat. Namun pada tahun 2024 alat track geometry trolley yang siap digunakan hanya 1 unit dari jumlah tersedia 4 unit. Hal tersebut dikarenakan 3 unit alat track geometry trolley perlu dilakukan kalibrasi dan perawatan, sehingga dilakukan penjadwalan pengujian jalan rel untuk memaksimalkan kondisi alat track geometry trolley yang siap operasi.

Tabel II. 9 Kondisi Alat Track Geometry Trolley di Balai Pengujian Perkeretaapian

Nama alat	Kondisi	Gambar
Track geometry trolley trimble	1 baik, 1 belum dikalibrasi	
Track geometry trolley amberg	1 belum dikalibrasi	
Track geometry trolley abtus	1 belum dikalibrasi	

Sumber: Tim PKL Balai Pengujian Perkeretaapian, 2024

F. Arah Pembangunan Perkeretaapian Indonesia

Untuk meningkatkan integrasi antar kota, pulau, dan perekonomian negara, pemerintah melakukan perencanaan dan strategi pembangunan perkeretaapian di seluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam memajukan transportasi massal di Indonesia. Arah pembangunan perkeretaapian di Indonesia menjadi hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian. Karena setiap sarana prasarana penunjang tugas Balai Pengujian Perkeretaapian harus siap dan laik untuk digunakan. Salah satunya pada sektor peralatan pengujian yang harus mencukupi jumlah tim penguji dan rencana pengujian kedepannya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan dijelaskan arah pengembangan perkeretaapian mulai dari tahun 2005 s.d Tahun 2025. Arah pengembangan perkeretaapian disebar kembali pada beberapa pulau yang menjadi fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera

Program jangka panjang pengembanan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera meliputi upaya untuk:

- a. Mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi untuk angkutan penumpang dan barang, khususnya untuk komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, dan biaya murah;
- b. Mendukung integrasi antar kota mulai dari kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata, serta kota-kota agropolitan baik kehutanan, pertanian dan perkebunan;
- c. Menyambung Lintas KA Trans Sumatera (Nangroe Aceh Darussalam-Provinsi Lampung);
- d. Menghubungkan jaringan KA dengan pelabuhan dan bandara.

2. Pulau Jawa-Bali

Program jangka panjang pengembanan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali meliputi upaya untuk:

- a. Optimalisasi jalur kereta api lintas selatan dan lintas utara Jawa serta pembangunan jalur ganda secara bertahap, rencana pengembangan transportasi perkotaan yang akan dikembangkan pada kota jakarta dan Surabaya, serta transportasi lokal di wilayah Bandung, Semarang, dan Yogyakarta;
- b. Menghidupkan kembali Lintas KA dan peningkatan kapasitas jaringan prasarana perkeretaapian secara bertahap;
- c. Menghubungkan jaringan KA dengan dengan Pelabuhan laut dan bandara udara dalam rangka menciptakan keterpaduan antar moda transportasi;
- d. Mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di kota-kota metropolitan;
- e. Meningkatkan *share* pada moda jalan rel terutama untuk penumpang kereta api di Pulau Jawa dengan menggunakan Kereta Api Cepat.

3. Pulau Kalimantan

Program jangka panjang pengembangan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan meliputi upaya untuk:

- a. Mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi yang handal, cepat dan murah, dan lebih dititik beratkan pada angkutan barang namun tidak menutup kemungkinan untuk angkutan penumpang;
- b. Persiapan dan kajian rinci pengembangan jaringan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah, khususnya angkutan batubara dan aksesibilitas pergerakan barang Serawak-Sabah.
- c. Memberikan akses ke sentra produksi (tambang, perkebunan, kehutanan, dll);
- d. Mendukung peningkatan keterkaitan ekonomi antar wilayah di Pulau Kalimantan terutama untuk membuka daerah yang masih terisolir dan keterkaitan ekonomi antara wilayah dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kerangka *Trans Asian Railways*.

4. Pulau Sulawesi

Program jangka panjang pengembangan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali meliputi upaya untuk:

- a. Mengembangkan jaringan jalur kereta api yang berkapasitas tinggi, khususnya untuk angkutan barang dan produk komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, dan biaya murah;
- b. Mendukung pengembangan sistem kota-kota yang terpadu melalui pengintegrasian kota-kota di wilayah pesisir, baik industri, pertambangan, ,maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan seperti kehutanan, perkebunan, dan pertanian;
- c. Pembangunan jalur integrasi antar kota seperti Manado-Bitung, Gorontalo-Bitung, Palu-Poso, Pare Pare-Mamuju, Kendari-Kolaka, dll.